

# Pemaknaan Khalayak Mengenai Polemik Kebijakan KPI pada Tayangan Q&A Metro TV

Ari Septiahadi<sup>1\*</sup>, Deviani Setyorini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis korespondensi; e-mail: ari.septiahadi@gmail.com

---

## Abstrak

Tahun 2019 acara *talk show Q&A Metro TV* mengundang komisioner KPI pusat sebagai narasumber untuk membahas kebijakan KPI yang menjadi polemik. Namun, jawaban KPI pada acara tersebut menjadi polemik lain bagi penonton. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa teguran yang diberikan KPI kepada pelanggar penyiaran hanya basa-basi karena tidak menimbulkan efek jera. Penelitian lain juga menemukan bahwa kebijakan KPI tidak berpihak pada publik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode analisis resepsi, penelitian ini bertujuan untuk melihat pemaknaan khalayak terhadap polemik kebijakan KPI pada tayangan *Q&A*. Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan posisi pemaknaan khalayak, yaitu dominan, negosiasi, dan oposisi. Dalam penelitian ini, dari 5 orang informan yang diwawancarai terbagi ke dalam 3 kategori posisi pemaknaan. Pada posisi dominan terdapat 1 informan yang setuju dengan alasan pembuatan kebijakan KPI yang menjadi polemik. Pada posisi negosiasi terdapat 2 informan yang setuju dengan tujuan kebijakan yang dibuat KPI, namun menolak alasan dan cara yang digunakan. Pada posisi oposisi terdapat 2 informan menganggap kebijakan yang dibuat KPI tidak perlu dan mereka tak setuju dengan alasan dibuatnya kebijakan yang menjadi polemik. Selain itu, 4 dari 5 informan menganggap kehadiran KPI hanya untuk membela diri dan menjaga citra lembaga di depan publik.

**Kata kunci:** Komisi Penyiaran Indonesia; analisis resepsi; talk show; Metro TV.

## Abstract

*In 2019 a television talk show Q&A Metro TV invited commissioner of Central Indonesian Broadcasting Commission (KPI) as a guest to discuss about KPI's policies that became controversies. But, KPI's answer made another controversies. In previous studies, the warning given by KPI to broadcasting violators was only a formality because it doesn't give a deterrence effect. Another study also found that KPI's policy doesn't stand with public concerns. Through a descriptive approach and using the reception analysis method, this study aims to interpret the audience's interpretation of the KPI's policy controversy on the Q&A. The results of the study based on the three possible positions of the audience's interpretation, dominant, negotiation, and opposition. In this study, there are 5 informants divided into 3 categories of interpretation positions. In a dominant position, there is 1 informant who agrees with the reasons of KPI policy which has become a controversy. In the negotiate position, there were 2 informants who agreed with the policy objectives made by KPI, but rejected the reasons and methods used. In the opposition position, there were 2 informants who considered the policies made by the KPI are unnecessary and they did not agree with the reasons behind the policy which became a controversy. In addition, 4 out of 5 informants consider the appearance of KPI in television only to defend themselves and maintain the image of the institution in public.*

**Keywords:** Indonesian Broadcasting Commission; reception analysis; talk show; Metro TV.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



---

## 1. PENDAHULUAN

Program *talk show Q&A* yang tayang di *Metro TV* mengundang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai narasumber pada 29 September 2019. Episode hari itu, *Q&A* membahas tentang kebijakan KPI yang menjadi polemik beberapa waktu sebelumnya. Yang pertama adalah saat KPI mengeluarkan pernyataan akan mengawasi konten layanan *over-the-top* (OTT) pada Agustus 2019. KPI beralasan bahwa pengawasan perlu

dilakukan agar kontennya berkualitas, memiliki nilai edukasi, dan menjauhkan masyarakat dari konten berkualitas rendah (Watra, 2019). Wacana KPI tersebut mendapat reaksi tidak menyenangkan dari publik. Petisi dengan judul “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!” muncul di laman web change.org sebagai respon publik terhadap wacana KPI mengawasi konten layanan OTT (Nasution, 2019).

Penolakan keras dari publik terhadap wacana KPI mengawasi layanan OTT bukan tanpa alasan. Nasution (2019) dalam petisi yang diinisiasinya menilai KPI tidak bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga independen yang mengawasi penyiaran *free-to-air*. Contohnya adalah masih banyaknya tayangan di televisi yang tidak berkualitas, seperti adegan sinetron yang tidak masuk akal, *talk show* yang sensasional, dan komedi dengan guyonan tak sopan.

Rendahnya kualitas tayangan di televisi dapat dilihat melalui hasil riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilakukan oleh KPI pada periode II tahun 2019. Nilai indeks kualitas program siaran televisi menunjukkan angka 2,90. Angka tersebut masih belum mencapai standar berkualitas KPI yang berada pada angka 3,00. Bahkan, sejak tahun 2017 nilai indeks kualitas program siaran televisi tidak pernah mencapai standar berkualitas yang ditetapkan KPI. Jika dijabarkan lebih mendetail berdasarkan kategori, program acara hiburan seperti sinetron, *variety show*, dan program acara *infotainment* nilainya tidak pernah mencapai angka 3,00 (Komisi Penyiaran Indonesia, 2019).

Yang kedua adalah tagar #BubarkanKPI sempat menjadi *trending topic* di Twitter Indonesia pada 16 September 2019. Tagar ini ramai setelah KPI merilis surat teguran tertulis kepada 14 program siaran di televisi dan radio. Di antaranya, teguran terhadap kartun *Spongebob* dan trailer film *Gundala* yang dianggap melanggar nilai dan norma kesusilaan (Raditya, 2016). Joko Anwar sebagai sutradara film *Gundala* merespon dengan sinis terhadap surat teguran tertulis itu melalui cuitannya di Twitter dengan menyematkan tagar #BubarkanKPI. Cuitan tersebut membuat publik ramai-ramai meluapkan kekesalan terhadap KPI dengan tagar #BubarkanKPI (Putsanra, 2019).

Sentimen negatif yang muncul terhadap KPI tak lepas dari kebijakannya yang tidak proaktif. Menurut Remotivi (2019) kebijakan KPI lemah dan sangat populis karena aksinya tergantung pada seberapa viral suatu isu. Misalnya, iklan mars Perindo yang tayang sejak tahun 2015 namun baru diberikan teguran oleh KPI pada tahun 2017 (Hanifan, 2017), sensor pada wawancara atlet renang yang memakai pakaian renang (Fikrie, 2016), sensor busana yang menerawang pada kontestan Puteri Indonesia (Tashandra, 2016), hingga sensor pada tokoh kartun yang mengenakan bikini. Penyensoran dilakukan pihak stasiun televisi karena khawatir melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan takut disanksi KPI (Putri, 2018).

Sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang kebijakan KPI. Misalnya, kritik terhadap regulasi dan penerapan sanksi KPI (Tjiadarma & Eriviany, 2016) dan kebijakan KPI yang dianggap lebih berpihak pada industri penyiaran (Sukmawati & Armando, 2019). Pada penelitian Tjiadarma & Eriviany (2016) menanggapi sanksi yang diberikan KPI hanya basa-basi karena tidak memiliki dampak berat bagi stasiun televisi yang melanggar peraturan. Sehingga, pelanggaran yang sama dapat terulang dan diberikan sanksi berkali-kali, namun stasiun televisi yang melanggar tidak memiliki desakan dalam memperbaiki kualitas konten yang ditayangkan. Selain itu, P3SPS yang dijadikan KPI sebagai acuan dalam mengawasi penyiaran penuh dengan kerancuan dan kerumpangan. Misalnya, program siaran yang telah mendapat teguran tertulis dua kali akan mendapatkan sanksi yang lebih berat jika kembali melakukan pelanggaran. Namun, tidak dijelaskan lebih rinci apakah dua teguran tertulis yang diterima sebelumnya harus pelanggaran atas pasal yang sama atau pasal yang berbeda. Selain itu, penentuan sanksi yang lebih berat juga tidak dijelaskan lebih spesifik. Akibatnya, pemberian sanksi sangat bergantung pada subjektivitas dan integritas komisioner KPI (Tjiadarma & Eriviany, 2016).

Pada penelitian Sukmawati & Armando (2019) menunjukkan bahwa Komisioner KPI lebih memilih berdialog dengan stasiun televisi yang melanggar P3SPS dibandingkan menggunakan wewenangnya untuk memberikan sanksi dan teguran. Padahal, KPI didirikan sebagai perwujudan aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat umum. Namun, dari beberapa penelitian yang disebutkan sebelumnya menunjukkan sebaliknya.

Di tengah kegaduhan publik terhadap polemik kebijakan KPI, kehadiran KPI di televisi publik, yaitu *Q&A Metro TV*, merupakan kesempatan bagi publik untuk mengetahui alasan dari kebijakan-kebijakan KPI yang

tidak berpihak kepada kepentingan publik. Penelitian tentang kebijakan KPI ini melihat masalah melalui analisis resepsi yang belum pernah dilakukan pada penelitian terkait kebijakan KPI sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemaknaan khalayak mengenai polemik kebijakan KPI pada tayangan *Q&A Metro TV*.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 KPI Sebagai Regulator Penyiaran

Pembentukan KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU tersebut dibuat untuk menggantikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. UU No. 24 Tahun 1997 menganggap penyiaran sebagai bagian dari instrumen kekuasaan yang penggunaannya dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah. Pasca reformasi, hal itu dianggap tidak menjunjung proses demokratisasi di Indonesia sehingga diganti dengan UU No. 32 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur penyiaran, KPI diberikan wewenang untuk membuat regulasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebijakan KPI kemudian diterbitkan dan dikenal sebagai P3SPS. P3SPS mengatur hal-hal terkait peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Selain pada undang-undang dan norma yang berlaku di Indonesia, kebijakan KPI dalam mengatur dan mengawasi penyiaran juga secara khusus berpedoman pada UU Penyiaran 2002 dan P3SPS.

Kebijakan sendiri menurut Suharto (2011:3-4) menyangkut segala macam keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan sumber daya untuk kepentingan publik, yakni masyarakat, penduduk, atau warga negara. Setiap undang-undang atau peraturan tertulis dapat disebut sebagai kebijakan, namun tidak setiap kebijakan harus diwujudkan dalam peraturan tertulis. Abidin (2012:19) menyebutkan bahwa kebijakan dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau merealisasikan tujuan yang diinginkan masyarakat. Widodo (2010:14) menyebutkan hal serupa, bahwa maksud dan tujuan sebuah kebijakan adalah untuk mencari solusi dari masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat.

Oleh karena itu, P3SPS dapat juga disebut sebagai kebijakan KPI. Selain itu, segala keputusan yang diambil oleh KPI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat disebut juga sebagai kebijakan. Hal-hal yang disebut sebagai kebijakan KPI tak terbatas pada keputusan-keputusan yang menyangkut pada pelanggaran terhadap penyiaran. Kebijakan KPI juga menyangkut segala keputusan yang diambil oleh KPI terhadap suatu masalah yang didesak publik.

### 2.2 *Talk Show* Televisi sebagai Ruang Diskusi Publik

Konsep ruang publik atau *public sphere* dikembangkan oleh Habermas sebagai tempat terjadinya perbincangan mengenai berbagai macam isu di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Seiring perkembangan teknologi, televisi dianggap sebagai media yang memberi ruang dan menstimulasi diskusi publik (Wahab, 2011). Salah satu jenis program siaran televisi yang memfasilitasi berjalannya sebuah dialog tentang suatu isu adalah *talk show*.

*Talk show* adalah salah satu jenis program siaran televisi yang populer dan menarik banyak penonton. Tolson dalam Rusadi (2012) membagi *talk show* menjadi tiga bagian, pertama pembicaraan atau *talk* adalah pola interaksi verbal seperti dalam perbincangan sehari-hari; kedua perbincangan itu dipahami sebagai perbincangan yang dilembagakan di mana topik perbincangan yang dibahas sudah dipersiapkan dan diatur; ketiga bentuk perbincangan yang dilembagakan diproduksi dengan tujuan tertentu dan diarahkan kepada khalayak tertentu.

Topik pembicaraan yang dijadikan tema perbincangan adalah daya tarik program *talk show*. Wibowo dalam Latief & Utud (2015:24-25) menjelaskan ada tiga kriteria yang menjadikan topik perbincangan menarik. Pertama, masalah sedang ramai dan hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kedua, masalah tersebut menimbulkan

kontroversi dan konflik. Ketiga, masalah tersebut berkaitan dengan kepentingan publik dan masyarakat membutuhkan kejelasan atas masalah tersebut.

Namun demikian, menurut Rusadi (2012) media massa, dalam konteks ini adalah *talk show* televisi, sulit menjalankan peran sebagai ruang diskusi publik. Narasumber sebagai tamu memanfaatkan *talk show* sebagai panggung politik untuk mengembangkan citra dirinya. Sementara, *talk show* yang diproduksi oleh lembaga penyiaran menjadikan kontroversi dan konflik atas topik perbincangan sebagai bahan transaksi untuk mendapat keuntungan secara ekonomi dan politik bagi media itu sendiri. Masyarakat memang mendapatkan wawasan dan pencerahan atas isu yang menjadi topik pembicaraan. Akan tetapi, perbincangan yang dilembagakan dalam sebuah *talk show* tak lepas dari kepentingan ekonomi politik media itu sendiri.

### 2.3 Teori Analisis Resepsi

Analisis resepsi merupakan studi yang memahami hubungan antara media dengan audiensnya. Audiens dianggap sebagai khalayak aktif yang memiliki kekuasaan untuk memproduksi dan mereproduksi makna ketika mengonsumsi teks media (Ida, 2014:161). Proses produksi dan reproduksi makna terjadi karena interaksi antara khalayak dengan teks media. Penciptaan makna oleh khalayak aktif juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti pengalaman dan latar belakang khalayak itu sendiri (Hadi, 2009).

Analisis resepsi dikemukakan oleh Stuart Hall. Hall merupakan salah seorang peneliti terkenal dari *Birmingham University Centre for Contemporary Cultural Studies*. Hall menghasilkan laporan yang penting dan kemudian memengaruhi penelitiannya. Karya tersebut diterbitkan sebagai bab dalam sebuah buku dan dikenal dengan nama *encoding-decoding* (pengodean-penafsiran). Intinya, Hall berpendapat bahwa peneliti kajian budaya harus memusatkan perhatiannya pada (1) analisis atas konteks sosial dan politik dalam produksi konten (*encoding*/pengodean); (2) konsumsi konten media (*decoding*/penafsiran) (Baran & Davis, 2014:303).

Dalam menjelaskan perspektifnya tentang penafsiran, Hall membuat sebuah pendekatan terhadap penelitian khalayak yang dikenal dengan analisis resepsi. Pada pendekatan ini Hall menganggap bahwa segala bentuk konten media dapat dipandang sebagai teks yang tersusun dari simbol-simbol yang terstruktur dan terkait satu sama lain. Lambang-lambang tersebut beserta struktur teksnya harus dipahami agar bisa membaca dan menafsirkan suatu teks media (Baran & Davis, 2014:304).

Meski sebagian besar teks media dianggap bersifat polisemi, Hall dalam Baran & Davis (2014:304) mengatakan bahwa secara umum pembuat pesan dalam memproduksi teks media menginginkan pemahaman yang disukai atau disebut juga *dominant or preferred reading*. Akan tetapi, khalayak mungkin saja membuat penafsiran yang berbeda karena tidak setuju bahkan salah menafsirkannya, sehingga khalayak membuat alternatif pemaknaan dari *preferred reading* yang disebut makna negosiasi atau *negotiated meaning*. Selain itu, khalayak juga mungkin saja membuat penafsiran yang berlawanan dengan *preferred reading* yang disebut juga *oppositional reading*.

Dengan kata lain, Hall membagi khalayak ke dalam tiga kategori ketika memaknai teks media (Branston & Stafford 2010:392), yaitu:

- a. Dominan / *Dominant Reading*. Pada posisi ini khalayak memahami, menafsirkan, dan secara garis besar setuju terhadap pesan yang disampaikan oleh pembuat pesan. Posisi ini adalah posisi yang diinginkan oleh si pembuat pesan ketika mereka membuat pesan.
- b. Negosiasi / *Negotiated Reading*. Pada posisi ini khalayak memahami pesan yang disampaikan, namun tidak sepenuhnya setuju dalam beberapa aspek ketika memaknai teks media. Khalayak kemudian membuat penafsiran sendiri yang sebagian inti pentingnya berbeda dengan pemaknaan posisi dominan.
- c. Oposisi / *Oppositional Reading*. Pada posisi ini khalayak memahami pesan yang disampaikan melalui teks media, namun menolak dan membuat penafsiran yang sepenuhnya berlawanan dengan posisi dominan.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data dari partisipan penelitian. Selain itu, peneliti

juga menggunakan studi dokumentasi untuk mendapatkan data dari teks media dan mempelajari penelitian serupa terkait kebijakan KPI.

Partisipan dalam penelitian ini ditentukan dengan rancangan *sampling* non-probabilitas. Teknik *sampling* yang digunakan dalam menentukan partisipan penelitian adalah *purposive sampling*. Teknik ini memilih orang-orang yang menjadi partisipan dalam penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan peneliti (Kriyantono, 2006:158). Kriteria yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut: (1) pernah menonton tayangan *Q&A Metro TV* episode 29 September 2019; (2) berprofesi sebagai mahasiswa, ibu rumah tangga, wirausaha, karyawan swasta, dan pegawai pemerintahan; (3) berusia antara 18—35 tahun.

Kriteria pertama ditentukan karena penelitian ini membahas polemik kebijakan KPI dalam mengawasi penyiaran yang diangkat menjadi sebuah topik perbincangan di acara *Q&A Metro TV*. Kriteria kedua dan ketiga ditentukan karena jenis pekerjaan dan usia dianggap dapat memberikan keberagaman perspektif dalam konteks sosial masyarakat (Nelissen, Konig, & Karsten, 2008). Peneliti meminta para partisipan untuk menonton ulang tayangan *Q&A Metro TV* terlebih dahulu paling tidak sehari sebelum wawancara dilaksanakan. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk mendapatkan partisipan penelitian dengan keberagaman gender agar bisa menambah variasi data penelitian. Untuk mendapatkan informan penelitian, peneliti membuat sebuah *recruitment letter* yang peneliti sebarkan melalui media sosial yang peneliti miliki, yaitu Instagram dan Twitter. Peneliti juga memanfaatkan lingkungan sosial peneliti untuk membantu menyebarkan *recruitment letter* dan mendapatkan informan yang sesuai kriteria.

**Tabel 1.** Partisipan Penelitian

Informan	1	2	3	4	5
<b>Nama</b>	Mega	Bara	Ica	Panji	Novi
<b>Gender</b>	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
<b>Usia</b>	23	28	21	25	32
<b>Profesi</b>	Karyawan Swasta	Pegawai Pemerintah	Mahasiswa	Wira-swasta	Ibu Rumah Tangga
<b>Domisili</b>	Jakarta	Banjar	Serang	Serang	Surabaya
<b>Pendidikan</b>	S1 Komunikasi Penyiaran Islam	S1 Manajemen	S1 Ilmu Komunikasi (sedang ditempuh)	S1 Ilmu Administrasi Bisnis	S1 Pendidikan Ekonomi

Sumber: Diolah oleh peneliti

Peneliti mengumpulkan arsip tayangan *Q&A Metro TV* episode 29 September 2019 untuk dianalisis dan menemukan *preferred reading*. Hasil analisis teks media peneliti gunakan untuk membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara peneliti gunakan untuk mewawancarai partisipan penelitian dengan kriteria yang sudah ditentukan. Wawancara antara peneliti dengan informan didokumentasikan secara audio visual dan diterjemahkan ke dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan observasi. Data berupa transkrip wawancara dan catatan observasi kemudian peneliti ringkas dan membuat kategorisasi sesuai dengan tema-tema pemaknaan yang muncul dari informan penelitian. Peneliti kemudian melakukan interpretasi data dengan membandingkan pemaknaan yang muncul dari partisipan penelitian dengan *preferred reading* dari teks media. Interpretasi data yang peneliti lakukan harus mempertimbangkan faktor kontekstual dari informan, seperti latar belakang dan pengalaman. Hasil dari interpretasi kemudian peneliti tampilkan ke dalam tiga kategori pemaknaan dari Stuart Hall, yaitu dominan, oposisi, dan negosiasi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk ke pembahasan tentang pemaknaan khlayak mengenai polemik kebijakan KPI pada tayangan *Q&A Metro TV*, peneliti terlebih dahulu memaparkan hasil analisis teks media. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui *preferred reading*, yaitu makna dominan dari sebuah teks media, dalam hal ini adalah jawaban komisioner KPI atas polemik kebijakan yang tayang pada *Q&A Metro TV*.

Untuk mendapatkan *preferred reading*, analisis dilakukan secara deskriptif dengan cara mengidentifikasi dan mengategorikan tema-tema sentral yang menjadi isu perbincangan dan dimunculkan dalam penelitian ini. Hasil analisis peneliti gunakan untuk membuat pedoman wawancara. Selain itu, peneliti membandingkan *preferred*

*reading* dari teks media dengan pemaknaan khalayak dan mengategorisasikannya ke dalam tiga kategori pemaknaan, yaitu dominan, negosiasi, dan oposisi.

Analisis yang peneliti lakukan terhadap tayangan *Q&A Metro TV* menghasilkan empat tema sentral yang menjadi topik perbincangan dan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Keempat tema itu dipilih karena menjadi bahan perbincangan yang sering diperdebatkan dari keseluruhan acara. Keempat tema tersebut ialah (1) sensor tayangan yang berlebihan; (2) ketegasan KPI terhadap tayangan kartun; (3) pembelaan KPI pada tayangan sinetron; (4) peran KPI dalam mengatasi masalah penyiaran. *Preferred reading* dari keempat tema ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.** Preferred reading tayangan Q&A Metro TV

No	Tema	Preferred Reading
1	Sensor tayangan yang berlebihan	Penyensoran yang berlebihan yang dilakukan oleh lembaga penyiaran disebabkan karena kurangnya pemahaman lembaga penyiaran terhadap konteks peraturan.
2	Ketegasan KPI terhadap tayangan kartun	KPI menganggap orang tua cenderung membiarkan anak-anaknya tanpa pendampingan ketika menonton tayangan kartun. KPI juga menganggap dibandingkan manusia, tokoh-tokoh animasi lebih membangun imajinasi anak sehingga cenderung untuk ditiru. Oleh karena itu, tayangan kartun yang memuat kekerasan yang berpotensi untuk ditiru oleh anak-anak akan ditegur oleh KPI. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perlindungan KPI terhadap anak-anak dari tayangan yang tidak ramah anak sesuai dengan yang diamanatkan di dalam peraturan.
3	Pembelaan KPI pada tayangan Sinetron	Dalam menilai kualitas sebuah tayangan, KPI menggunakan P3SPS sebagai indikatornya. Selama tidak melanggar P3SPS, maka bisa dianggap tidak ada masalah. KPI juga melihat konteks dan nilai-nilai moral yang dimiliki sebuah tayangan secara keseluruhan. Oleh karena itu KPI menganggap sinetron azab memiliki nilai moral yang bagus secara konteks. Meskipun, KPI mengakui pada awalnya sinetron seperti ini memiliki masalah karena mengeksploitasi jenazah, namun saat ini hal itu sudah tidak terjadi lagi.
4	Peran KPI dalam mengatasi masalah penyiaran	KPI menganggap sebanyak apa pun peraturan belum tentu dapat mengakomodasi perbedaan dan perubahan nilai dan norma yang muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Sehingga, KPI sebagai regulator harus terbuka terhadap dinamika dan keberagaman norma tersebut ketika ada permasalahan yang belum dinaungi oleh peraturan yang ada.

Sumber: Diolah oleh peneliti

## 4.1 Pemaknaan Khalayak terhadap Polemik Kebijakan KPI

### 4.1.1 Sensor Tayangan yang Berlebihan

Andini Effendi sebagai pembawa acara membawakan materi pengantar tentang sensor berlebihan yang terjadi di siaran televisi. Misalnya, tokoh kartun yang disensor saat memakai bikini, hingga puting sapi yang sedang diperah juga disensor. Sebagai seseorang yang bekerja di televisi, Andini mengatakan jika tidak disensor takut akan ditegur oleh KPI. Menurutnya, peraturan di P3SPS juga tak menjelaskan dengan detail bagian tubuh tertentu yang dilarang ditampilkan apakah hanya manusia atau termasuk hewan.

Sementara itu, menurut Nuning Rodiyah, hal seperti ini terjadi karena aturan tentang pelarangan menampilkan bagian tubuh tertentu tidak dimengerti secara kontekstual. Aturan tersebut ada untuk mengatur tentang adegan seksual. Hal itu kemudian yang menyebabkan terjadinya sensor yang berlebihan. Informan 4 setuju dengan pernyataan Nuning bahwa lembaga penyiaran televisi kurang memahami konteks peraturan yang ada sehingga menimbulkan sensor yang berlebihan. Menurut informan 4 KPI adalah orang yang berwenang dalam mengatur penyiaran, sementara lembaga penyiaran adalah pihak yang diatur. Oleh karena itu, pihak lembaga penyiaran seharusnya mengikuti peraturan dari yang berwenang.

Berbeda dengan informan 4, informan 5 menanggapi jika hal itu merupakan tanggung jawab KPI sepenuhnya. Menurut informan 5 aturan yang ada masih kurang jelas. Selain itu, menurutnya juga respon KPI dalam menjawab permasalahan terkait sensor terlalu berputar-putar hingga membuatnya kebingungan saat menonton. Apalagi jika lembaga penyiaran yang harus berhadapan langsung dengan KPI.

Informan 2 memberi tanggapan yang serupa dengan informan 5. Menurut informan 2, lembaga penyiaran dan KPI memiliki pemahaman yang berbeda dalam menerapkan aturan yang ada, sehingga keduanya terlihat tidak akur. Menurut informan 2 sensor yang berlebihan dilakukan lembaga penyiaran tak lepas dari tanggung jawab KPI. Informan 2 berpendapat peraturan terkait sensor yang kurang jelas adalah penyebabnya.

Informan 1 dan 3 memiliki pendapat yang berbeda dengan ketiga informan lainnya. Sensor yang berlebihan terjadi merupakan tanggung jawab dua belah pihak, KPI dan lembaga penyiaran. Informan 1 dan 3 juga sama-sama mengatakan bahwa aturan yang ada terkesan kurang jelas sehingga membuat lembaga penyiaran takut ditegur oleh KPI.

Sebelum menonton tayangan *Q&A Metro TV*, informan 3 sudah mengetahui bahwa KPI tak memiliki wewenang untuk melakukan sensor. Lain halnya dengan informan 1 yang baru mengetahui hal tersebut setelah menonton tayangan *Q&A Metro TV*. Selama ini informan 1 mengira tugas sensor dibagi ke dua lembaga, sensor di televisi dilakukan oleh KPI, sementara sensor di film dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

Informan 4 juga sempat mengira bahwa sensor di televisi dilakukan oleh KPI. Informan 4 menganggap pernyataan lulus sensor yang ditampilkan sebelum acara televisi dimulai adalah salah satu tugas KPI. Padahal tugas itu dilakukan oleh LSF.

Dari lima informan, informan 1 dan 3 menganggap sensor yang berlebihan terjadi merupakan tanggung jawab dua pihak, yaitu KPI dan lembaga penyiaran televisi. Sementara itu, informan 4 memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya sensor yang berlebihan terjadi merupakan tanggung jawab lembaga penyiaran yang kurang mampu memahami konteks peraturan. Pendapat informan 4 berbanding terbalik dengan informan 2 dan 5. Menurut informan 2 dan 5 sensor yang berlebihan terjadi merupakan tanggung jawab KPI karena membuat peraturan yang kurang jelas.

#### 4.1.2 Ketegasan KPI terhadap Tayangan Kartun

KPI dinilai sangat ketat dan tegas dalam menindak tayangan kartun khususnya yang mengandung tindakan kekerasan. Menurut KPI hal itu dilakukan untuk melindungi anak-anak dari tayangan yang tidak ramah anak. Tindakan tersebut dilakukan KPI sebagai salah satu bentuk menjalankan tugas yang diamanatkan dalam Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Informan 3 setuju dengan pernyataan KPI. Tindakan KPI dinilai sudah sesuai dengan tugas yang diamanatkan.

Informan 1 juga mengapresiasi usaha yang dilakukan KPI. Namun, informan 1 tak setuju dengan alasan lain dari ketegasan KPI terhadap tayangan kartun. Alasan lain yang KPI katakan adalah tayangan kartun lebih membangun imajinasi anak-anak sehingga cenderung untuk ditiru. Selain itu, KPI berpendapat bahwa orang tua cenderung membiarkan anak-anaknya tanpa pendampingan ketika menonton tayangan kartun.

Informan 2 dan 5 mengemukakan pendapat yang serupa dengan informan 1. Menurut informan 2 anak-anak tidak mungkin meniru dari tayangan kartun, melainkan lebih mungkin meniru dari orang asli.

Informan 2 juga memberi pendapat yang ia kutip dari komentar warganet yang mengatakan bahwa KPI menilai tayangan anak-anak melalui pandangan orang dewasa. Padahal menurut informan 2, anak-anak menonton tayangan kartun hanya sebagai hiburan saja.

Sementara itu, informan 5 menceritakan pengalamannya dahulu yang gemar menonton kartun *Tom & Jerry*, tetapi tak pernah meniru adegan kekerasannya. Informan 5 juga berpendapat bahwa tindakan KPI yang menegur tayangan kartun karena mengandung tindakan kekerasan adalah berlebihan. Menurutnya anak-anak menonton tayangan kartun hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk ditiru.

Informan 4 mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan informan 5. Informan 4 lebih setuju dengan KPI jika anak-anak memiliki kecenderungan untuk meniru adegan kekerasan pada tayangan kartun. Namun, menurut informan 4 hal itu juga tergantung ada atau tidaknya pengawasan dari orang tua.

Meski berpendapat demikian, informan 4 tetap setuju dengan pendapat KPI yang mengatakan orang tua cenderung membiarkan anak-anaknya tanpa pendampingan ketika menonton tayangan kartun. Informan 4

memiliki pandangan target pasar dari tayangan kartun adalah anak-anak. Lalu, jika sudah tayang di televisi artinya tayangan tersebut aman untuk ditonton anak-anak.

Informan 5 tidak setuju dengan alasan KPI yang mengatakan bahwa orang tua cenderung melepaskan pengawasan terhadap anak-anaknya ketika menonton tayangan kartun. Menurut informan 5, anak-anak sudah seharusnya didampingi ketika sedang menonton tayangan apa pun. Anak-anak yang menonton tanpa didampingi merupakan bentuk kelalaian orang tua.

Alasan KPI menegur tayangan kartun sangat tidak masuk akal bagi informan 5. Sebagai seorang ibu, informan 5 selalu melakukan pengawasan terhadap apa yang ditonton anaknya yang belum genap berusia 2 tahun. Menurut informan 5, hal yang dilakukannya merupakan hal yang sudah sewajarnya dilakukan oleh semua orang tua terhadap anaknya. Pengawasan dan pendampingan terhadap tayangan anak-anak akan terus dilakukan hingga anaknya memiliki cukup pengetahuan untuk menonton tayangan yang sesuai usianya.

Informan 3 dan 4 menganggap apa yang dilakukan KPI sudah benar karena itu merupakan bagian dari tugas KPI. Sementara itu meski mengapresiasi tindakan KPI, menurut informan 1 alasan KPI yang mengatakan bahwa anak-anak cenderung meniru dari tayangan kartun tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Di sisi lain, informan 2 dan 5 tak setuju dengan alasan yang dikeluarkan oleh KPI dalam menindak tayangan kartun yang mengandung unsur kekerasan. Menurut kedua informan, anak-anak menonton tayangan kartun hanya sebagai hiburan dan senang-senang saja.

#### **4.1.3 Pembelaan KPI pada Tayangan Sinetron**

Kebijakan KPI yang tegas terhadap tayangan kartun tidak terlihat dalam melakukan pengawasan terhadap sinetron. Hal ini yang membuat Dara Nasution, salah satu panelis dalam tayangan *Q&A Metro TV*, menilai KPI memiliki kebijakan yang tebang pilih. Informan 3 juga menganggap bahwa KPI melakukan tebang pilih dalam menindak tayangan sinetron dibandingkan dengan tayangan kartun.

Padahal, ada juga anak-anak yang menonton sinetron. Beberapa sinetron juga ada yang mengandung adegan kekerasan dan tidak ramah anak. *Q&A Metro TV* menampilkan cuplikan adegan sinetron yang mengandung kekerasan dan perundungan. Namun, KPI beralasan bahwa pada tayangan sinetron jika ada anak-anak yang ikut menonton, maka ada orang dewasa yang menonton sehingga mampu untuk mendampingi. Oleh karena itu, KPI merasa tidak perlu menindak tayangan sinetron seketat menindak tayangan kartun. Padahal, menurut informan 5, ada juga anak-anak yang menonton tayangan sinetron tanpa adanya orang dewasa yang ikut menonton sehingga tak ada pengawasan.

Informan 2 merasa aneh dengan alasan yang dikatakan KPI dalam mengawasi tayangan sinetron. Padahal anak-anak pun tetap butuh pendampingan apa pun jenis tayangan yang disaksikan.

Informan 1 mengatakan hal yang tak jauh berbeda dengan informan 2. Informan 1 tak setuju dengan alasan KPI yang tidak menindak tayangan sinetron secara ketat. Menurutnya KPI seharusnya bisa menilai sebuah tayangan secara keseluruhan.

Informan 4 juga tak setuju dengan kebijakan KPI yang terkesan melakukan standar ganda antara tayangan kartun dengan sinetron. Menurut informan 4, hal itu membuat KPI terkesan tidak konsisten dalam menegakkan aturan dan menjalankan tugas.

Dara Nasution juga mempertanyakan keberadaan tayangan sinetron seperti sinetron azab. Bagi Dara sinetron azab memiliki adegan yang tak masuk akal dan berlebihan karena mengeksploitasi jenazah. Menurut informan 2, sinetron seperti ini sudah ada sejak dahulu. Namun, dahulu masih dapat diterima oleh masyarakat. Seiring perkembangan zaman yang modern pola pikir masyarakat juga sudah berkembang. Seharusnya sinetron azab juga bisa mengembangkan idenya agar tetap masuk akal dan tidak berlebihan.

KPI pun mengakui adanya eksploitasi jenazah pada sinetron azab. Tetapi, KPI sudah pernah melakukan diskusi dengan pihak produksi dan eksploitasi itu sudah tidak terjadi lagi. KPI menganggap sinetron azab memiliki

nilai moral yang bagus. Namun, informan 3 tak setuju dengan pernyataan KPI tersebut. Menurut informan 3 sinetron azab terlalu hitam putih dan tidak realistis dengan kenyataan sebenarnya.

Dari kelima informan yang peneliti wawancarai, informan 3, 4, dan 5 sudah tidak pernah menonton sinetron. Sementara informan 1 dan 2 menonton sinetron secara kebetulan ketika ada orang lain di rumahnya yang sedang menonton. Menurut informan 1, sinetron yang ia saksikan hanya bagus di awal. Semakin banyak episode semakin menurun kualitas ceritanya. Menurut informan 2 jika dibandingkan dengan sinetron zaman dahulu, kualitas masa kini kualitasnya lebih rendah. Informan 2 berpendapat bahwa sinetron masa kini lebih mengutamakan untuk mengejar *rating*.

Kelima informan yang peneliti wawancarai menganggap KPI melakukan standar ganda dalam menindak tayangan sinetron jika dibandingkan dengan tayangan kartun. Kelima informan memiliki pendapat yang serupa. KPI seharusnya bisa konsisten dalam menjalankan tugasnya.

#### 4.1.4 Peran KPI dalam Mengatasi Masalah Penyiaran

Dari diskusi antara panelis dan narasumber ditemukan salah satu sumber masalah, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS merupakan peraturan turunan undang-undang yang dibuat oleh KPI untuk mengatur lembaga penyiaran di Indonesia. P3SPS yang saat ini digunakan terakhir kali diperbaharui pada tahun 2012. Menurut Maman Suherman P3SPS yang saat ini digunakan tidak mendetail dan tidak teknis. Permasalahan P3SPS yang tidak teknis ini juga mengakibatkan pada penegakkan hukum yang subjektif dan bergantung pada komisioner KPI. Contohnya, KPI pernah melarang mewawancarai orang yang tidak sadar. Namun, larangan tersebut dicabut ketika komisioner KPI berganti. Oleh karena itu, Maman Suherman menyarankan agar P3SPS direvisi agar lebih mendetail dan teknis.

Informan 1 setuju jika P3SPS segera direvisi secara mendetail dan teknis. Revisi peraturan juga harus dikoordinasikan dengan lembaga lain yang terkait. Misalnya, Informan 1 menyebutkan bahwa KPI harus menyamakan aturan kategorisasi tayangan dengan LSF. Keempat informan lainnya juga setuju jika P3SPS direvisi harus mendetail dan teknis. Revisi diperlukan untuk mengurai kerancuan aturan agar menjadi jelas. Jika aturannya mendetail dan jelas maka aturan akan lebih mudah dimengerti dan diterapkan oleh lembaga penyiaran. Hal itu juga akan mempermudah KPI dalam menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran.

KPI juga setuju jika P3SPS dianggap bermasalah karena sudah lama tidak direvisi dan isinya ketinggalan zaman. Namun, menurut KPI sedetail dan sebanyak apa pun peraturan yang ada, belum tentu dapat mengakomodasi perubahan nilai dan norma masyarakat Indonesia yang dinamis. Saat itu terjadi, di situlah peran KPI dibutuhkan.

Informan 1 berpendapat bahwa memang sudah menjadi tugas KPI adaptif terhadap perubahan nilai dan norma masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus tetap dituangkan menjadi peraturan tertulis. Informan 2 juga memberikan pendapat yang serupa dengan informan 1. Menurut informan 2, jika perlu aturan direvisi sesering mungkin mengikuti perkembangan nilai dan norma masyarakat agar tidak bergantung pada subjektivitas komisioner KPI.

Informan 3 juga mengatakan hal yang tak jauh berbeda dengan informan 1 dan 2. Menurut informan 3 peran KPI memang diperlukan ketika terjadi masalah penyiaran yang belum ada aturannya. Akan tetapi, KPI tidak boleh bertindak secara subjektif dari pemikirannya sendiri. KPI harus berkonsultasi dengan pakar atau ahli terkait masalah yang terjadi.

Tanggapan dari informan 4 dan 5 juga tak jauh berbeda dengan tiga informan sebelumnya. Informan 4 mengatakan bahwa peran KPI memang dibutuhkan. Akan tetapi, harus ada landasan aturan dalam pelaksanaannya karena kebijakan KPI bisa saja subjektif. Sementara itu, informan 5 menambahkan bahwa KPI harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelanggaran siaran yang terjadi dan membuat kebijakan yang mengantisipasi agar pelanggaran serupa tak terulang kembali.

Sebagai sebuah lembaga publik, kebijakan yang dibuat KPI harusnya berpihak pada publik. Namun, menurut informan 1 dan 3 jawaban KPI dalam menanggapi kebijakannya yang menjadi polemik tidak mencerminkan

keberpihakan pada publik. Bagi informan 1 jawaban KPI seperti hanya keluar dari opini dan asumsi pribadi tanpa adanya landasan ilmiah yang kuat.

Dalam menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran *free-to-air*, informan 1 berpendapat bahwa KPI seharusnya mau mendengarkan aspirasi yang datang dari masyarakat. KPI juga seharusnya lebih proaktif dalam bertindak. Perbedaan pandangan karena masyarakat Indonesia yang majemuk memang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, KPI juga harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pakar dan ahli di bidang yang dibutuhkan.

#### 4.2 Pemaknaan Terhadap Tayangan Q&A Metro TV

Sebagai sebuah tayangan *talk show*, Q&A dikemas dengan menarik. Tak hanya mengundang narasumber dari pihak yang terkait dengan topik perbincangan, Q&A juga mengundang panelis. Para panelis yang diundang merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang terkait topik perbincangan yang bertanya dan berargumentasi dengan narasumber. Dari wawancara peneliti dengan 5 informan, kelimanya menganggap tayangan Q&A “Antara KPI & Spongebob” adalah tayangan yang bagus dan dikemas dengan menarik. Meskipun dari 5 informan, informan 1, 2, 4, dan 5 baru tahu dan baru pernah menonton tayangan ini pada episode 29 September 2019 saja. Keempat informan itu baru mengetahui karena adanya *teaser* program yang sempat ramai di media sosial dan menontonnya melalui YouTube. Di sisi lain informan 3 telah mengetahui bahwa ada program acara Q&A di *Metro TV*. Tidak seperti keempat informan lainnya yang menonton melalui YouTube, informan 3 sempat menonton Q&A di televisi pada jadwal penayangannya.

Informan 4 dan 5 yang sudah jarang menonton televisi juga menganggap tayangan Q&A menarik karena mengangkat isu terkini dan mengundang narasumber yang terkait dengan isu yang menjadi topik perbincangan. Menurut informan 5 topik yang diangkat Q&A memang menarik. Namun, baginya pembahasan dan bahasa yang digunakan cukup berat. Informan 5 mengaku agak kesulitan untuk mengikuti pembahasan. Ditambah jawaban dari komisioner KPI yang berputar-putar yang membuat informan 5 kebingungan.

Tayangan Q&A *Metro TV* menjadi menarik berkat peran pembawa acara, panelis, dan narasumber yang mampu mengurai topik perbincangan dan memberi solusi dari isu yang diangkat. Informan 4 dan 5 menganggap kehadiran para panelis yang diundang sudah cukup mewakili terhadap topik perbincangan dan untuk bertanya kepada narasumber. Informan 2 juga merasa panelis yang hadir sudah cukup untuk mewakili terhadap topik perbincangan. Akan tetapi, dari 5 panelis yang diundang ada 1 panelis yang menurutnya jarang bicara, yaitu Razak Syarif. Padahal, menurut informan 2 Razak Syarif sangat aktif berbicara di konten-konten yang dibuatnya di kanal YouTube Cine Crib.

Sementara itu, menurut informan 1 dan 3 panelis yang dihadirkan masih kurang mewakili terhadap topik perbincangan. Informan 3 berpendapat bahwa seharusnya ada 3 orang ahli dalam bidang industri penyiaran yang diundang sebagai panelis.

Kehadiran komisioner KPI sebagai narasumber sudah memberi jawaban yang memuaskan bagi informan 4. Menurutnya KPI dapat menjawab persoalan yang menjadi topik perbincangan dalam tayangan Q&A *Metro TV*. Sementara itu, informan 1, 2, 3, dan 5 menganggap kehadiran KPI sebagai narasumber hanya untuk membela diri. Menurut keempat informan tersebut, jawaban KPI terkesan berlandaskan atas opini pribadi.

Pemaknaan keempat informan terhadap KPI sebagai narasumber dalam tayangan membenarkan perkataan Rusadi (2012) yang peneliti kutip sebelumnya. Masyarakat memang mendapatkan wawasan dan pencerahan atas polemik kebijakan KPI. Akan tetapi, KPI yang hadir sebagai narasumber memanfaatkan *talk show* sebagai panggung politik untuk mempertahankan citra dirinya.

#### 4.3 Pembahasan

Hasil dari penelitian menunjukkan informan yang peneliti wawancarai memberikan pemaknaan yang beragam terhadap polemik kebijakan KPI dalam tayangan Q&A *Metro TV*. Perbedaan dan keberagaman pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa informan mengonsumsi teks media sebagai khalayak aktif. Teks media memang

memiliki makna tersendiri yang ditawarkan kepada khalayak. Namun, bagi khalayak aktif, mereka tidak akan menerima secara mentah-mentah makna yang ditawarkan. Pemaknaan terhadap teks media yang dilakukan khalayak aktif dipengaruhi oleh faktor kontekstual, seperti pengalaman dan latar belakang khalayak itu sendiri.

Proses pembuatan makna oleh KPI dikonstruksikan, dibingkai, dan disampaikan sedemikian rupa dalam tayangan *Q&A Metro TV* “Antara KPI & Spongebob”. Penggunaan bahasa untuk menyampaikan pesan juga dibuat dengan tujuan tertentu agar penerima pesan dapat menerima dan setuju dengan pesan yang disampaikan. Proses ini dapat disebut sebagai *encoding*/pengodean. Sementara itu, penonton tayangan *Q&A Metro TV* “Antara KPI & Spongebob” sebagai khalayak aktif yang mengonsumsi teks media tidak selalu menerima dengan sama makna yang disampaikan pada awalnya. Perbedaan itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh pemikiran, persepsi, dan pengalaman penonton. Proses ini yang disebut sebagai *decoding*/penafsiran. Dalam memaparkan pandangan terkait *decoding*/penafsiran Hall (Baran & Davis, 2014:304) mengidentifikasi tiga kemungkinan posisi khalayak dalam menafsirkan makna dari teks media, di antaranya posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi.

Pada posisi pertama penafsiran yang dibuat khalayak dalam memaknai teks media sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh pembuat pesan. Posisi dominan dalam penelitian adalah informan menganggap bahwa alasan KPI dalam membuat kebijakan yang menjadi polemik pada tayangan *Q&A Metro TV* sudah sesuai hukum dan mempertimbangkan kepentingan publik. Informan 4 termasuk dalam posisi pembaca dominan karena secara garis besar ia memaknai alasan KPI dalam membuat kebijakan yang menjadi polemik pada tayangan *Q&A Metro TV* sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPI. Bagi informan 4 kebijakan KPI yang menjadi polemik dalam tayangan *Q&A Metro TV* sudah mempertimbangkan dan berpihak pada kepentingan publik. Hal itu diperlihatkan pada ketegasan KPI dalam menindak tayangan kartun yang mengandung unsur kekerasan dilakukan untuk melindungi anak-anak dari tayangan yang tidak ramah anak. Selain itu aturan terkait sensor terhadap tayangan sudah dibuat sedemikian rupa. Seharusnya lembaga penyiaran harus bisa mengikuti aturan yang ada.

Informan 4 memaknai polemik kebijakan KPI dalam tayangan *Q&A Metro TV* berdasarkan pemikiran dan pengalaman pribadi. Peneliti menilai literasi media informan 4 juga masih kurang. Hal itu dibuktikan dalam sesi wawancara yang peneliti lakukan dengan informan. Dalam wawancara itu informan 4 mengatakan bahwa ia tidak terlalu memperhatikan kategorisasi usia tayangan yang ada di televisi dan mengira tayangan kartun ditujukan untuk anak-anak.

Posisi kedua adalah negosiasi. Khalayak memahami pesan yang disampaikan, namun tidak sepenuhnya setuju dalam beberapa aspek ketika memaknai teks media. Khalayak kemudian membuat penafsiran sendiri terhadap teks media. Dalam penelitian ini, informan termasuk dalam posisi negosiasi ketika informan menganggap bahwa kebijakan KPI yang menjadi polemik pada tayangan *Q&A Metro TV* bertujuan untuk kepentingan publik, namun alasan dan pertimbangan yang digunakan masih berdasarkan pertimbangan dan aspirasi dari KPI sendiri. Pada penelitian ini, ada dua informan yang termasuk dalam posisi pembaca negosiasi, yaitu informan 1 dan 3. Informan 1 dan 3 memahami bahwa kebijakan KPI yang menjadi polemik pada tayangan *Q&A Metro TV* dilakukan karena KPI menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas penyiaran. Namun, pertimbangan yang digunakan KPI dalam menerapkan kebijakannya masih belum mempertimbangkan keberpihakan dan kepentingan publik.

Informan 1 dan 3 memiliki latar belakang pendidikan yang sama, yaitu pada bidang ilmu komunikasi. Yang membedakan keduanya adalah informan 1 menempuh studi di perguruan tinggi Islam, sementara informan 3 menempuh studi di perguruan tinggi umum. Faktor pendidikan membuat informan 1 dan 3 memiliki pengetahuan tentang KPI lebih baik dibandingkan tiga informan lainnya. Informan 1 dan 3 memiliki penafsiran negosiasi terhadap polemik kebijakan KPI tayangan *Q&A Metro TV*, yakni sensor tayangan yang berlebihan terjadi bukan hanya karena lembaga penyiaran yang kurang memahami aturan terkait sensor, tetapi aturan terkait sensor juga tidak begitu jelas. Informan 1 dan 3 juga setuju peran KPI sangat diperlukan khususnya ketika terjadi permasalahan dalam penyiaran yang belum ada aturannya. Namun, bukan berarti bisa bertindak atas aspirasi dan pertimbangan dari lembaganya sendiri. KPI seharusnya lebih sering menerima aspirasi dari masyarakat dan meminta pendapat dari pakar atau ahli yang berkaitan jika diperlukan.

Informan 1 juga berada dalam posisi pembaca negosiasi saat menafsirkan ketegasan KPI terhadap tayangan kartun. Informan 1 mengapresiasi usaha yang dilakukan KPI untuk melindungi anak-anak dari tayangan yang

tidak ramah anak. Namun, ia tak setuju jika alasannya adalah anak-anak cenderung meniru dari tayangan kartun. Padahal ada banyak faktor lain yang bisa memengaruhi perilaku anak-anak selain dari tayangan televisi. Sementara itu, informan 3 berada pada posisi pembaca dominan. Menurut informan 3, apa yang dilakukan KPI ini memang sudah menjadi bagian dari tugas KPI sebagai pengawas penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran informan 1 lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sementara informan 3 oleh pengetahuannya.

Di sisi lain, informan 1 dan 3 juga memiliki pemaknaan oposisi, seperti dalam memaknai pembelaan KPI terhadap tayangan sinetron. Menurut kedua informan itu, KPI terkesan melakukan standar ganda dalam menindak tayangan sinetron dibandingkan dengan tayangan kartun. KPI juga seharusnya dapat melihat tayangan sinetron dengan konteks yang lebih mendalam, bukan hanya sekadar nilai moral yang dimiliki sinetron.

Ketiga adalah posisi oposisi. Pada posisi ini khalayak memahami makna yang disampaikan dalam teks media, namun khalayak menolak makna tersebut dan membuat penafsiran yang berbeda atau bisa sepenuhnya berlawanan dengan makna yang dimaksudkan oleh pembuat pesan atau makna dominan. Posisi oposisi dalam penelitian adalah informan menganggap bahwa alasan KPI dalam membuat kebijakan yang menjadi polemik pada tayangan *Q&A Metro TV* tidak masuk akal dan tidak mempertimbangkan kepentingan publik.

Posisi pembaca oposisi pada penelitian ini ditunjukkan oleh dua informan, yaitu informan 2 dan 5. Menurut informan 2 dan 5 alasan KPI dalam membuat kebijakan yang menjadi polemik pada tayangan *Q&A Metro TV* tidak masuk akal dan tidak mempertimbangkan kepentingan publik. Misalnya, pada ketegasan KPI terhadap tayangan kartun dengan asumsi anak-anak akan cenderung untuk meniru ketika menonton tayangan kartun. Padahal, menurut informan 2 dan 5 anak-anak menonton tayangan kartun hanya untuk hiburan dan bersenang-senang. Selain itu, informan 2 dan 5 tak setuju dengan pembelaan KPI terhadap tayangan sinetron. Seharusnya KPI juga menindak tayangan sinetron yang mengandung unsur kekerasan karena ada anak-anak juga ada yang menonton. Tetapi, KPI terkesan melakukan standar ganda antara tayangan sinetron dengan tayangan kartun karena menurut KPI anak-anak yang menonton tayangan sinetron ada orang dewasa atau orang tua yang mendampingi. Informan 2 dan 5 mengatakan bahwa sudah merupakan kewajiban orang tua untuk mendampingi dan mengawasi tontonan anak-anak. Seharusnya KPI bisa menggunakan alasan tersebut untuk menindak tayangan kartun dan sinetron, bukan hanya salah satunya.

Penafsiran yang dilakukan oleh informan 2 dan 5 ini sangat terlihat jelas dari pengaruh lingkungan dan pengalaman. Dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti, informan 2 dan 5 selalu mengangkat pengalaman dan lingkungan mereka ketika dimintai pendapatnya. Selain itu, peneliti juga merasa bahwa literasi media yang dimiliki informan 5 sangat minim. Hal itu dibuktikan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa informan 5 kesulitan mengikuti perbincangan yang ada pada tayangan *Q&A Metro TV* karena bahasa yang digunakan berat dan pembahasan yang berputar-putar.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, masing-masing informan berada pada posisi yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa dimaklumi karena setiap informan memiliki pengaruh dan cara yang berbeda-beda dalam menafsirkan pesan dari teks media. Analisis pemaknaan pada penelitian ini menghasilkan 1 orang posisi dominan, 2 orang posisi negosiasi, dan 2 orang posisi oposisi. Hasil ini peneliti sajikan ke dalam Tabel 3.

**Tabel 3.** Pemaknaan Khalayak terhadap Polemik Kebijakan KPI pada tayangan *Q&A Metro TV*

No	Tema	Dominant Position	Negotiated Position	Oppositional Position
1	Sensor Tayangan yang Berlebihan	Informan 4	Informan 1,3	Informan 2,5
2	Ketegasan KPI terhadap Tayangan Kartun	Informan 3,4	Informan 1	Informan 2,5
3	Pembelaan KPI pada Tayangan Sinetron	Tidak ada	Tidak ada	Informan 1,2,3,4,5
4	Peran KPI dalam Mengatasi Masalah Penyiaran	Tidak ada	Informan 1,2,3,4,5	Tidak ada

Sumber: Diolah oleh peneliti

## 5. KESIMPULAN

Hasil dalam penelitian ini terdapat 3 posisi pemaknaan khalayak terhadap polemik kebijakan KPI pada tayangan *Q&A Metro TV* dan pemaknaan terhadap tayangan *Q&A Metro TV* itu sendiri yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan hanya ada 1 informan yang memaknai polemik kebijakan KPI dalam posisi dominan, yaitu informan 4. Informan 4 setuju dengan alasan dari kebijakan KPI yang menjadi polemik, yaitu sensor tayangan yang berlebihan dan ketegasan terhadap tayangan kartun.
2. Selanjutnya, terdapat 2 informan dalam posisi negosiasi, yaitu informan 1 dan 3. Informan 1 dan 3 memahami tujuan kebijakan yang dibuat KPI, tetapi menolak alasan dan cara yang digunakan. Sehingga, kedua informan berada dalam posisi negosiasi. Adapun kebijakan yang dimaknai secara negosiasi oleh informan 1 dan 3 adalah sensor tayangan yang berlebihan dan peran KPI dalam mengatasi masalah penyiaran.
3. Posisi ketiga yang terdapat dalam penelitian ini adalah oposisi. Pada posisi ini terdapat 2 informan, yaitu informan 2 dan 5. Kedua informan tersebut menganggap kebijakan yang dibuat KPI tidak perlu dan mereka tak setuju dengan alasan dibuatnya kebijakan yang menjadi polemik. Adapun kebijakan yang dimaknai secara oposisi oleh informan 2 dan 5 adalah sensor tayangan yang berlebihan, ketegasan KPI terhadap tayangan kartun, dan pembelaan KPI terhadap tayangan sinetron.
4. Dalam memaknai tayangan Q&A Metro TV, kelima informan menganggap tayangan ini menarik dan informatif. Selain itu, informan 4 dan 5 menganggap panelis yang dihadirkan sudah cukup representatif. Sementara informan 1, 2, dan 3 menganggap panelis yang dihadirkan masih belum cukup representatif terhadap topik perbincangan. Selain itu, hanya informan 4 yang merasa puas terhadap kehadiran KPI dalam menjawab kebijakannya yang menjadi polemik. Di sisi lain, 4 informan lainnya—informan 1, 2, 3, dan 5—menganggap kehadiran KPI sebagai narasumber hanya bertujuan untuk membela diri dan mempertahankan citra diri KPI sebagai lembaga di depan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik* (2 ed.). Jakarta: Salemba Humanika.
- Baran, S. J., & Davis, D. K. (2014). *Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan* (5 ed.). (A. Daud, & P. I. Izzati, Penerj.) Jakarta: Salemba Humanika.
- Branston, G., & Stafford, R. (2010). *The Media Student's Book* (5th ed.). New York: Routledge.
- Fikrie, M. (2016, September 19). *Sensor Atlet Renang: Netizen Mengkritik, KPI Mengelak*. Diambil dari <https://beritagar.id/artikel/berita/sensor-atlet-renang-netizen-mengkritik-kpi-mengelak>
- Hadi, I. P. (2009). Penelitian Khalayak dalam Perspektif Reception Analysis. *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, 3(1), 1-7.
- Hanifan, A. F. (2017, Mei 12). *Karena Iklan Perindo, MNC Grup Kena Sanksi KPI*. Diambil dari <https://tirto.id/karena-iklan-perindo-mnc-grup-kena-sanksi-kpi-cozY>
- Ida, R. (2014). *Metode Penelitian : Studi Media dan Kajian Budaya*. Jakarta: Kencana.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2019). *Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2019*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Pertama ed.). Jakarta: Kencana.
- Latief, R., & Utud, Y. (2015). *Siaran Televisi Non-Drama*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, D. (2019, Agustus 9). *Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!*
- Nelissen, P., Konig, R., & Renckstorf, K. (2008). *Occupational Position and Consumption of News: A Research Note*. 473-484.
- Putri, A. W. (2018, April 16). *Sensor di Layar TV Kita Menggambarkan Penonton adalah Subjek Pasif*. Diambil dari <https://tirto.id/sensor-di-layar-tv-kita-menggambarkan-penonton-adalah-subjek-pasif-cHr7>
- Putsanra, D. V. (2019, September 16). *Spongebob & 13 Program Disanksi, Bubarkan KPI Jadi Trending Twitter*. Diambil dari <https://tirto.id/spongebob-13-program-disanksi-bubarkan-kpi-jadi-trending-twitter-eiai>
- Raditya, I. N. (2019, September 16). *Sejarah dan Tugas KPI: Menegur Gundala & Spongebob*. Diambil dari <https://tirto.id/sejarah-dan-tugas-kpi-menegur-gundala-spongebob-eibR>
- Remotivi. (2019, September 1). *Presiden Jokowi: Evaluasi Komisi Penyiaran Indonesia!* Diambil dari Remotivi: <https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/541/presiden-jokowi-evaluasi-komisi-penyiaran-indonesia>
- Rusadi, U. (2012). Talk Show Isu Publik di Televisi dan Dinamika Demokrasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 16(1), 17-26.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, D., & Armando, A. (2019). Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengaturan Isi Siaran. *Jurnal Komunikasi Global*, 151-173.
- Tashandra, N. (2016, Februari 27). *Heboh Sensor Kebaya di Tayangan Puteri Indonesia, Ini Jawaban Pihak TV*. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/27/09444691/Heboh.Sensor.Kebaya.di.Tayangan.Puteri.Indonesia.I.ni.Jawaban.Pihak.TV?page=all>
- Tjiadarma, E. L., & Eriviany, G. (2016). *Rambu-rambu Ambigu: Kritik Terhadap Regulasi dan Penerapan Sanksi KPI*. Diambil dari Remotivi.
- Wahab, J. A. (2011). Television Talk Shows and the Public Sphere. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 27(2), 29-45.
- Watra, B. L. (2019, Agustus 5). *KPI Akan Awasi Konten Youtube Hingga Netflix*.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep & Aplikasi Analisis Proses Kenijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.